DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2019). Panggungharjo, Sewon, Bantul. *Wikipedia*. Diperoleh 1 Januari 2020. Dari https://id.wikipedia.org/wiki/Panggungharjo,_Sewon,_Bantul
- Aliyah, S. dan Nahar, A. (2012). Pengaruh penyajian laporankeuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing. Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189.*
- Aprilian. N.K.A., et al. 2015. Pengaruh penyajian laporan keuangan,karakteristik kualitatif, dan aksesibilitas terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah(studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klungkung). eJournal S1 Ak *Universitas Pendidikan Ganesha*. *Jurusan Akuntansi Program S1*. (Volume 3 No 1 Tahun 2015).
- Bagas, C. 2020. 6 Januari. Desa. *Wikipedia*. Diperoleh 10 Januari 2020. Dari https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Dewi, A S. 2019. Peran Pemerintah Desa Panggungharjo Bantul Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa. Yogyakarta. *Journal of Public Administration and Local Governance*. *Vol 3 No 1 Tahun 2019*
- Hoesada, Jan. 2016. Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta
- Koran SINDO. 2014. 26 September. Dana Desa: Berkah atau Petaka ?. *SINDONEWS*. Diperoleh 10 Januari 2020. dari https://nasional.sindonews.com/read/905681/16/dana-desa-berkah-atau-petaka-1411743403
- Lewier, C.N. dan Kurniawan, C.H. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Skripsi. *Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Mustofa. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. ISSN 2252-6765.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. 2013. 23 September. Dibantul Baru Ada 9 BUMDes Yang Terdaftar di PMD. *Bantulkab*. Diperoleh 11 Januari 2020. Dari https://www.bantulkab.go.id/detailberita/Di-Bantul-Baru-Ada-9-BUMDes-Yang-Terdaftar-di-PMD

- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaga Negara RI Tahun 2014. No. 5495. Sekertariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Lembaga Negara RI Tahun 2014. No. 5558. Sekertariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaga Negara 2014. Sekertariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Lembaga Negara Tahun 2016. Sekertariat Negara. Jakarta
- Stefanus A.D. 2018. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran Studi Kasus Di Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Edisi 19. Bandung
- Sukhemi. 201. Pengauh Aksesibilitas dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Yogyakarta. *Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol 10, No1 (2013)*
- Widodo, Bely, Musikal, Remon (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Yuliansyah, dan Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Salemba Empat. Edisi 1. Jakarta